

ANALISIS HIRARKI PUSAT – PUSAT KEGIATAN DI KOTA MANADO

Naltri Andre Wansaga¹, Linda Tondobala², Cynthia Wuisang³

¹Mahasiswa S1 Prodi Perencanaan Wilayah & Kota, Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

²Staf Pengajar Prodi S1 Perencanaan Wilayah & Kota, Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

Email : naltriwansaga025@student.unsrat.ac.id

Abstrak

Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan yang pesat. Dalam tata ruang wilayah Kota Manado terdapat pusat-pusat pelayanan yang tersebar di beberapa wilayah. Sebaran pusat pelayanan berhirarki sesuai dengan kelengkapan fasilitas dan skala pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi Ketersediaan Fasilitas Sosial, Ekonomi, Dan Pemerintahan Di Kota Manado; 2) Menganalisis Hirarki Dan Distribusi Pusat Pelayanan Di Kota Manado; 3) Menganalisis Kesesuaian Pusat Pelayanan Dalam RTRW Kota Manado Tahun 2014 – 2034 Terhadap Kondisi Eksisting Tahun 2019. Metode Analisis yang di pakai dalam penelitian ini adalah Skalogram, Analisis Indeks Sentralitas dan analisis Gravitasi. Dari hasil analisis diperoleh Sebaran fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan di Kota Manado, penyebarannya telah cukup memadai terutama dikecamatan yang berstatus orde I seperti Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Wanea, Kecamatan Wenang, dan Kecamatan Tuminting. Semua kecamatan tersebut memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan memadai. Hasil analisis hirarki wilayah Kota Manado terbagi dalam 4 Orde, yakni Orde I yang terdiri dari Kecamatan Malalayang, Wanea, Mapanget, Tuminting, dan Wenang. Kecamatan yang berada di Hirarki II yaitu Kecamatan Singkil, Paal Dua, Bunaken, Sario. Dan yang berada di Hirarki III yaitu Kecamatan Tikala, Serta Hirarki IV yakni Kecamatan Bunaken Kepulauan. Berdasarkan hasil analisis terjadi ketidaksesuaian antara pusat pelayanan dalam RTRW Kota Manado Tahun 2014-2034 terhadap kondisi eksisting tahun 2019.

Kata Kunci: *Kota Manado, Hirarki Wilayah, Pusat Pelayanan, Analisis Skalogram, Indeks Sentralitas, Gravitasi, Kesesuaian.*

PENDAHULUAN

Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan yang pesat. Seiring dengan berjalannya waktu, Kota Manado menjadi daerah urban terbesar di Wilayah Indonesia Bagian Timur. Menurut PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Kota Manado sebagai PKN (Pusat kegiatan Nasional), dengan fungsi jasa dan perdagangan makin memperkuat posisinya sebagai kota metropolitan.

Dalam Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota, penentuan rencana sistem pusat pelayanan kota dilakukan dengan memperhatikan rencana sistem struktur tata ruang Kota Manado yang dikaji berdasarkan perkembangan dan distribusi penduduk dan kegiatan serta kondisi eksisting struktur tata ruang kota saat ini. (RTRW Kota Manado Tahun 2014-2034). Tujuan pembagian pusat-pusat pelayanan dalam kota adalah agar terjadi pemerataan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan pada seluruh wilayah. Sebaran pusat pelayanan berhirarki sesuai dengan kelengkapan fasilitas dan skala pelayanan.

Hierarki perkotaan sangat perlu diperhatikan dalam perencanaan wilayah karena menyangkut fungsi yang ingin di arahkan untuk masing-masing kota. Dalam konteks dinamika perkembangan Kota Manado, terlaksananya fungsi itu berkaitan dengan fasilitas kepentingan umum yang ada di masing-masing wilayah. Banyaknya fasilitas yang harus tersedia di masing-masing kota harus sejalan dengan luas pengaruh kota tersebut, dan tata guna lahan. Jumlah penduduk yang diperkirakan akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Distribusi penduduk dan kegiatan pada beberapa bagian wilayah Kota Manado mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah prasarana dan sarana dan fasilitas pelayanan.

Beberapa pusat pelayanan sudah di arahkan dalam RTRW Kota Manado Tahun 2014-2034 dengan hirarki dan luas pengaruh yang berbeda. RTRW Kota Manado ketika dibuat menggunakan data sebelum tahun 2014, sampai sekarang ini selama ± 5 (lima) tahun telah terjadi perkembangan perkotaan yang signifikan. Mayoritas wilayah Kota Manado bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Telah terjadi peningkatan pusat-pusat pelayanan dalam mawadahi kebutuhan penduduk kota dan diperkirakan pusat-pusat ini belum terakomodir dalam RTRW Kota Tahun 2014-2034, dan perlu diakomodir dalam revisi RTRW 2014 – 2034.

Tujuan penelitian ini adalah 1)Mengidentifikasi Ketersediaan Fasilitas Sosial, Ekonomi, Dan Pemerintahan Di Kota Manado; 2)Menganalisis Hirarki Dan Distribusi Pusat Pelayanan Di Kota Manado; 3)Menganalisis Kesesuaian Pusat Pelayanan Dalam RTRW Kota Manado Tahun 2014 – 2034 Terhadap Kondisi Eksisting Tahun 2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Wilayah

Definisi wilayah menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 wilayah adalah ruang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

Kota

Pengertian kota secara umum adalah tempat bermukim, bekerja, dan kegiatan warga kota baik itu dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dll.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah, Kota adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Struktur Ruang

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan serta sistem prasarana maupun sarana. Semua hal itu berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial-ekonomi yang secara hirarki berhubungan fungsional.

Hirarki Perkotaan

Kata hirarki (hierarchy) pada dasarnya merupakan organisasi dengan susunan secara bertingkat (Salim,1996) . Menurut Nasoetion (1985) dalam Sukasmianto (1999), ada dua macam hirarki yaitu hirarki fungsional dan hirarki tata ruang. Hirarki fungsional terbentuk akibat pengelompokkan kegiatan sosial dan ekonomi tertentu pada tempat tertentu yang berfungsi sebagai pusat pelayanan. Sedangkan hirarki tata ruang mengacu kepada system tata ruang wilayah. Hirarki perkotaan (Robinson Tarigan 2004) menyatakan tempat-tempat konsentrasi yang umumnya berupa daerah perkotaan tersebar di suatu wilayah/negara

dengan penduduk (besarnya kota) yang tidak sama.

A. Faktor-Faktor Timbulnya Pusat

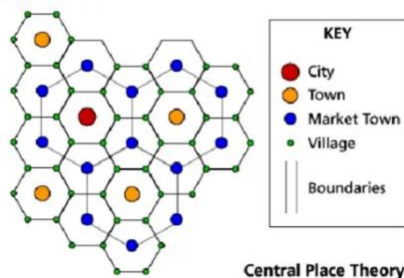
Pelayanan

- Faktor lokasi
Letak suatu wilayah yang strategis menyebabkan suatu wilayah dapat menjadi pusat pelayanan.
- Faktor ketersediaan sumber daya
Ketersediaan sumber daya dapat menyebabkan suatu wilayah menjadi pusat pelayanan
- Kekuatan aglomerasi
Kekuatan aglomerasi terjadi karena ada sesuatu yang mendorong kegiatan ekonomi sejenis untuk mengelompokkan pada suatu lokasi karena adanya suatu keuntungan yang selanjutnya akan menyebabkan timbulnya pusat-pusat kegiatan.
- Faktor investasi pemerintah
Kegiatan faktor diatas menyebabkan timbulnya pusat-pusat pelayanan secara ilmiah, sedangkan faktor investasi pemerintah merupakan sesuatu yang sengaja dibuat (artificial)

Teori Tempat Pusat

Christaller dan Losch mengasumsikan tempat semacam itu sebagai titik simpul-simpul dari suatu bentuk geometrik yang heksagonal yang memiliki kawasan pengaruh terhadap daerah sekitarnya. Hubungan dan lokasi tempat-tempat yang sentral dengan tempat yang sentral disekitarnya, membentuk hierarki jaringan seperti sarang lebah. Bentuk tersebut digambarkan pada gambar berikut:

Gambaran model Christaller yang menggunakan prinsip heksagonal yaitu sebagai berikut:



Sumber: www.agnazgeograph.wordpress.com

Gambar 2.1 Hierarki Tempat Pusat Yang Membentuk Sarang Lebah

Sarana

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sarana adalah bangunan fisik pelengkap yang menunjang kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Dalam penyediaan sarana tersebut harus memenuhi berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap jumlah dan jenis sarana tersebut.

Fasilitas Sosial

Fasilitas sosial merupakan fasilitas yang digunakan orang banyak atau fasilitas yang ditujukan untuk dipakai bersama. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau swasta yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jenis-jenis fasilitas sosial yakni fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan. Menurut Conyers, D. dan P. Hills (1984)

Fasilitas Ekonomi

Fasilitas ekonomi adalah fasilitas yang disediakan pemerintah dalam rangka menunjang perekonomian dalam suatu wilayah. Fasilitas ekonomi ini pun bisa disediakan oleh pihak swasta. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Conyers, D. dan P. Hills (1984)

Fasilitas Pemerintahan

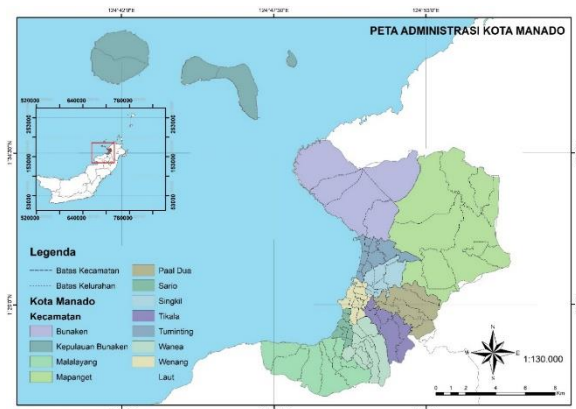
Fasilitas pemerintahan merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah yang berkaitan dengan fungsi pelayanan untuk masyarakat. Jenis-jenis fasilitas pemerintahan seperti kantor-kantor pemerintah atau kantor pelayanan publik.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. (Kasiram (2008)). Adapun penggunaan penelitian Kuantitatif digunakan untuk menjawab tujuan 1 dan 2 yaitu dengan metode analisis Skalogram, Indeks Sentralitas, dan Gravitasi dan pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder, untuk mengidentifikasi ketersediaan fasilitas sosial, perekonomian, dan pemerintahan dan menganalisis hirarki dan distribusi pusat pelayanan di Kota Manado. Untuk menjawab tujuan 3 menggunakan analisis deskriptif yang menjelaskan hasil analisis tujuan 1 dan 2.

Lokasi Penelitian



Gambar 3.1 Peta Aministrasi Wilayah Penelitian di Kota Manado

Jenis dan Sumber Data

Data primer antara lain meliputi kondisi geografis wilayah penelitian dengan cara obsevasi atau survei lapangan, untuk pengambilan foto atau gambar dan juga diskusi terfokus. Data sekunder antara lain data jumlah penduduk, data jumlah dan jenis fasilitas

perkotaan, data jarak antar wilayah, dan peta-peta yang terkait dengan penelitian, yang bersumber dari Instansi yang terkait.

Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : observasi, telaah pustaka, studi dokumentasi dan data statistik untuk melengkapi data yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Beberapa analisis yang dipakai dalam kajian ini adalah data kuantitatif yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis skalogram, analisis indeks sentralitas, dan analisis gravitasi, serta analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan menggambarkan keadaan wilayah penelitian sesuai data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasi berdasarkan tujuan yang dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Gambaran Umum Lokasi

a. Letak geografis dan administrasi

Kota Manado terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dan merupakan kota terbesar di belahan Sulawesi Utara sekaligus sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Utara. Secara geografis Kota Manado terletak di antara 10 25' 88" - 10 39' 50" LU dan 124 04' 00" - 124 06' 00" BT. Secara administratif, Kota Manado berbatasan dengan beberapa wilayah administratif sebagai berikut:

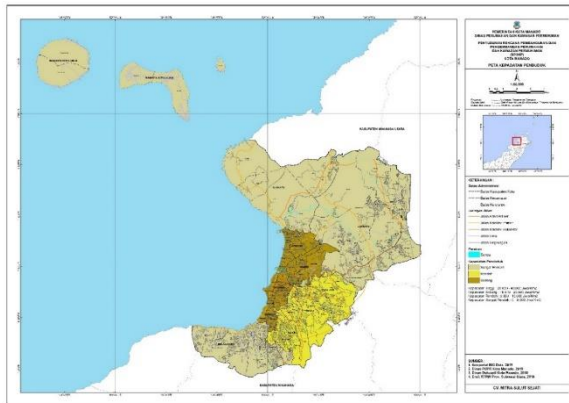
- Sebelah Utara dengan : Kecamatan. Wori (Kabupaten. Minahasa Utara) dan Teluk Manado
- Sebelah Timur dengan : Kecamatan. Dimembe (Kabupaten. Minahasa Utara) dan Kecamatan. Pineleng (Kabupaten, Minahasa)

- Sebelah Selatan dengan : Kecamatan. Pineleng (Kabupaten. Minahasa)
- Sebelah Barat dengan : Teluk Manado / Laut Sulawesi

Dengan luas wilayah Kota Manado sebesar 162,55 Km², terdiri dari 11 kecamatan dan 87 kelurahan

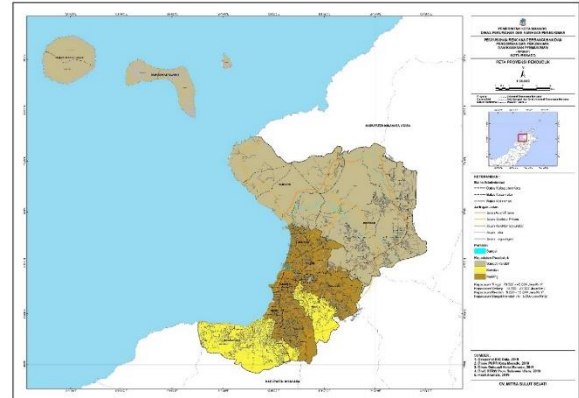
b. Kependudukan

Jumlah penduduk per Oktober 2019 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, berjumlah 532.953 jiwa. Besarnya jumlah penduduk di Kota Manado menyebabkan kepadatan penduduk menjadi cukup tinggi. Dengan luas wilayah 162,55 Km² yang berarti kepadatan penduduknya mencapai 3.388 jiwa/km².



Gambar 4.11 Peta Kepadatan Penduduk Kota Manado Tahun 2019

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di Kota Manado tersebut maka diprediksikan jumlah penduduk di Kota Manado pada Tahun 2039 adalah sejumlah 758.064 jiwa, dengan sebaran dapat dilihat pada peta berikut ini.



Gambar 4.13 Peta Kepadatan Penduduk Kota Manado Tahun 2039

Analisis Ketersediaan Fasilitas (Sarana) Perkotaan Di Kota Manado

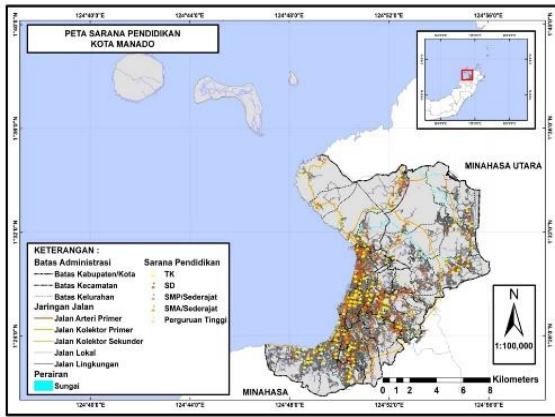
a. Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan data fasilitas pendidikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa persebaran fasilitas pendidikan di kota Manado dimana pada setiap kecamatan sudah memiliki fasilitas pendidikan dan juga tersebar di masing-masing kecamatan seperti TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.

Tabel 4. 13 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Manado Tahun 2019

No	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Total
1	Malalayang	53	25	9	8	5	100
2	Sario	16	14	7	10	2	49
3	Wanea	32	37	13	11	2	92
4	Wenang	37	42	13	16	4	62
5	Tikala	14	21	5	6	1	47
6	Paul Dua	15	27	10	6	4	112
7	Mapanget	52	21	9	7	1	75
8	Singkil	26	21	5	4	1	56
9	Tuminting	25	35	7	7	1	90
10	Bunaken	17	13	10	6	2	48
11	Bunaken Kepulauan	4	9	2	0	0	15
	Total	291	265	90	81	22	749

Sumber: Survei Lapangan, 2019.



Gambar 4. 25 Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan Kota Manado



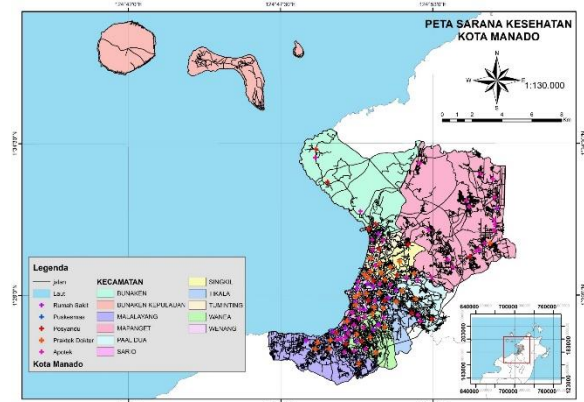
b. Fasilitas Kesehatan

Dari ketersediaan sarana kesehatan yang ada di Kota Manado pada tahun 2019, terdapat 14 unit rumah sakit umum, 18 unit Puskesmas, 299 unit posyandu, 103 praktek dokter, 3 unit klinik bersalin, dan 84 unit apotik. Penyebaran sarana kesehatan ini merata pada seluruh kecamatan.

Tabel 4. 14 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Manado Tahun 2019

N o	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu	Praktek Dokter	Apotik	Total
1	Malalayang	3	3	39	5	13	64
2	Sario	2	1	22	35	11	71
3	Wanea	2	2	40	8	12	64
4	Wenang	2	1	22	8	6	40
5	Tikala	-	1	27	6	5	39
6	Paal Dua	3	1	22	24	13	64
7	Mapanget	1	1	48	4	10	64
8	Singkil	-	2	24	2	5	33
9	Tuminting	1	3	31	10	9	54
10	Bunaken	-	2	15	1	-	18
11	Bunaken Kepulauan	-	1	9	-	-	10
	Total	14	18	299	103	84	521

Sumber: Survei Lapangan, 2019.



Gambar 4. 37 Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan Kota Manado



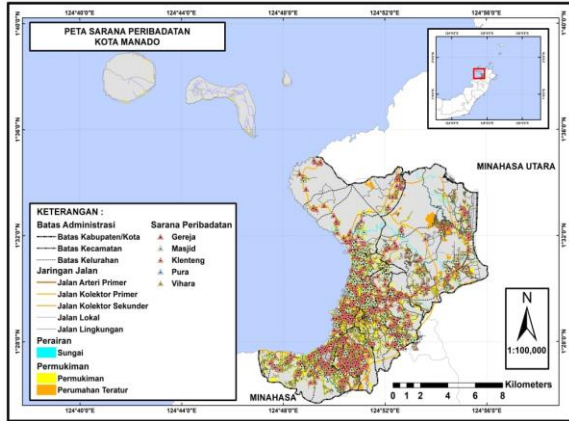
c. Fasilitas Peribadatan

Jumlah sarana peribadatan di Kota Manado pada tahun 2019 adalah 656 unit. Adapun jenis sarana peribadatan terbanyak di Kota Manado yaitu gereja sebanyak 578 unit. Banyaknya gereja di Kota Manado ini sangat dimaklumi, mengingat mayoritas penduduk Kota Manado adalah penganut agama Kristen.

Tabel 4. 15 Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kota Manado Tahun 2019

N o	Kecamatan	Masjid	Gereja	Vihara	Purana	KlenTeng	Total
1	Malalayang	10	56	1	1	0	68
2	Sario	7	23	0	0	1	31
3	Wanea	12	82	0	1	1	96
4	Wenang	9	34	3	0	3	63
5	Tikala	14	43	2	1	0	60
6	Paal Dua	28	61	3	0	0	49
7	Mapanget	13	105	1	0	0	70
8	Singkil	24	48	1	0	0	71
9	Tuminting	31	39	0	0	0	66
10	Bunaken	20	64	0	0	0	58
11	Bunaken Kepulauan	1	23	0	0	0	24
	Total	169	578	11	3	5	656

Sumber: Survei Lapangan, 2019.



Gambar 4. 49 Peta Sebaran Fasilitas Peribadatan Kota Manado



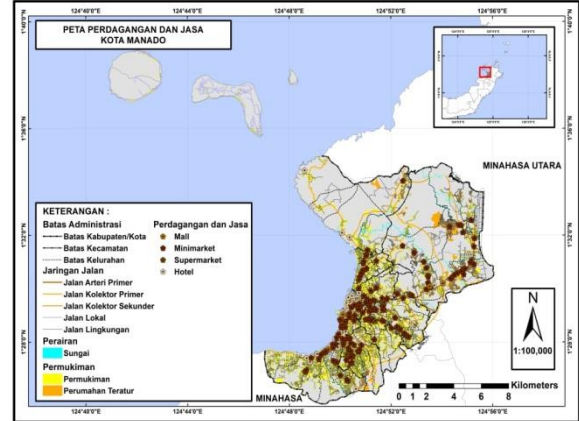
d. Fasilitas Perekonomian

Dari ketersediaan sarana perdagangan yang ada di Kota Manado pada tahun 2019, terdapat 8 unit mall/pusat perbelanjaan, 12 unit pasar, 17 unit swalayan, dan 175 unit minimarket. Penyebaran sarana perdagangan ini terdapat hanya pada beberapa kecamatan.

Tabel 4. 16 Jumlah Fasilitas Perekonomian di Kota Manado Tahun 2019

No	Kecamatan	Mall	Pasar	Swalayan	Minimarket	Total
1	Malalayang	1	2	3	13	19
2	Sario	3	0	0	18	21
3	Wanea	0	1	2	29	32
4	Wenang	2	2	3	8	15
5	Tikala	0	0	0	4	4
6	Paal Dua	0	1	3	19	23
7	Mapanget	2	2	2	28	34
8	Singkil	0	0	3	30	33
9	Tuminting	0	2	1	24	27
10	Bunaken	0	2	0	2	4
11	Bunaken Kepulauan	0	0	0	0	0
	Total	8	12	17	175	221

Sumber: Survei Lapangan, 2019.



Gambar 4. 61 Peta Sebaran Fasilitas Perekonomian Kota Manado



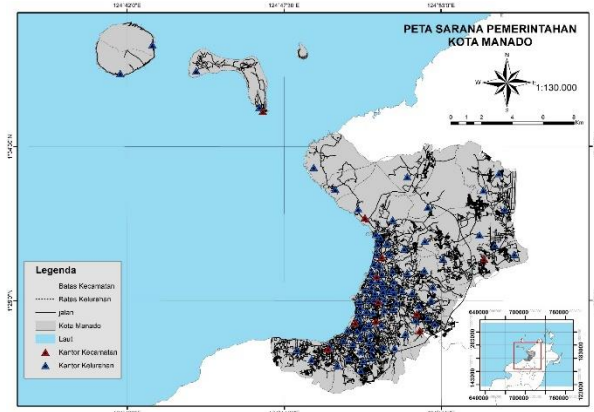
e. Fasilitas Pemerintahan

Adanya Fasilitas pemerintahan adalah penting untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan roda pemerintahan dan layanan kepada masyarakat pada suatu wilayah agar berjalan dengan cepat, baik, terarah serta teratur.

Tabel 4. 17 Jumlah Fasilitas Pemerintahan di Kota Manado Tahun 2019

No	Kecamatan	Kantor Kecamatan	Kantor Kelurahan	Total
1	Malalayang	1	9	10
2	Sario	1	7	8
3	Wanea	1	9	10
4	Paal Dua	1	7	8
5	Tikala	1	5	6
6	Wenang	1	12	13
7	Tuminting	1	10	11
8	Singkil	1	9	10
9	Mapanget	1	10	11
10	Bunaken	1	5	6
11	Bunaken Kepulauan	1	4	5
	Total	11	87	98

Sumber: Survei Lapangan, 2019.



Gambar 4.73 Peta Sebaran Fasilitas Pemerintahan Kota Manado



Analisis Hirarki Wilayah Kota Manado Berdasarkan Analisis Skalogram Dan Indeks Sentralitas

1. Analisis Skalogram

Analisis skalogram merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah (dalam hal ini kecamatan) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menentukan banyaknya kelas dalam menentukan jumlah hierarki yang dikehendaki dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Orde} = 1 + 3,3 \log n$$

$$\text{Jumlah Orde} = 1 + 3,3 \log 11$$

$$\text{Jumlah Orde} = 1 + 3,3 (1,041) = 4,43$$

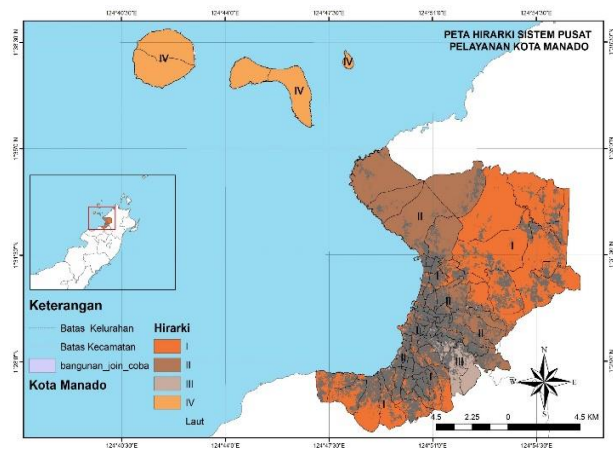
= dibulatkan

Tabel 4.20 Hasil Analisis Skalogram

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Area (Km2)	Jumlah Fasilitas	Orde \ Hirarki
1	Malalayang	75,827	17,96	21	I
2	Wanea	73,718	8,47	22	I
3	Mapanget	67,822	53,58	22	I

4	Tuminting	62,183	5,26	20	I
5	Singkil	61,198	4,87	18	II
6	Paal Dua	53,205	9,38	19	II
7	Wenang	39,591	3,47	21	I
8	Tikala	35,988	6,69	16	III
9	Bunaken	27,980	32,00	17	II
10	Sario	27,660	1,99	19	II
11	Bunaken Kepulauan	7,781	18,88	11	IV
Jumlah		532,953	162,55	206	

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2019



Gambar 4.74 Peta Hirarki Wilayah Kota Manado Berdasarkan Analisis Skalogram

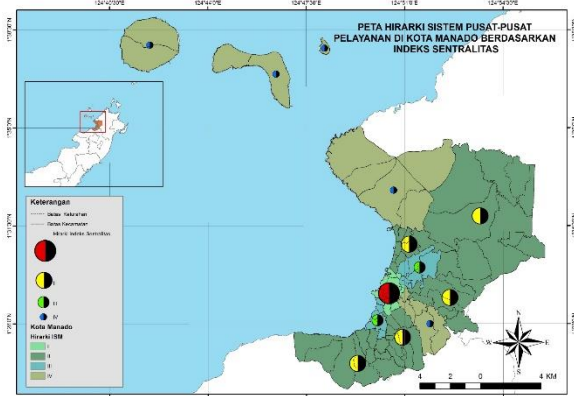
2. Analisis Indeks Sentralitas

untuk menentukan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dalam hal ini Pusat Kegiatan/Pelayanan tidak cukup hanya melihat keberagaman fasilitasnya saja, tetapi juga mempertimbangkan frekuensi setiap jenis fasilitas tersebut. Tingkat frekuensi fasilitas pada suatu kecamatan mempengaruhi indeks sentralitas kecamatan tersebut. Semakin tinggi frekuensinya maka akan semakin besar nilai sentralitasnya.

Tabel 4.35 Hasil Analisis Indeks Sentralitas berdasarkan bobot fasilitas yang dimiliki Tiap kecamatan Di Kota Manado

No	Kecamatan	Indeks Sentralitas	Ordo / Hirarki
1	Wenang	392.78	I
2	Malalayang	271.81	II
3	Tuminting	263.96	II
4	Wanea	263.21	II
5	Mapanget	240.61	II
6	Paal Dua	225.32	II
7	Sario	209.72	III
8	Singkil	182.21	III
9	Tikala	129.03	IV
10	Bunaken	124.19	IV
11	Bunaken Kepulauan	44.55	IV

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2019



Gambar 4.75 Peta Hirarki Sistem Pusat Pusat Pelayanan Di Kota Manado Berdasarkan Indeks Sentralitas

3. Analisis Interaksi (Gravitasi)

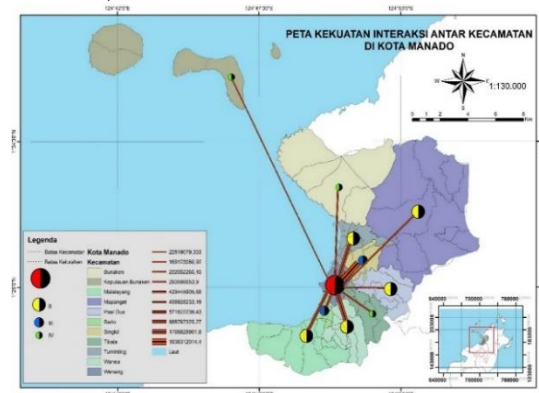
Analisis gravitasi digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi wilayah antar-kecamatan di Kota Manado. Analisis gravitasi dalam penelitian ini menjadikan wilayah Kecamatan Wenang sebagai destination atau tujuan karena pada proses analisis skologram dan indeks sentralitas Kecamatan Wenang merupakan kecamatan yang menjadi pusat pelayanan wilayah di Kota Manado sehingga kecamatan ini memiliki daya tarik yang kuat untuk menarik wilayah kecamatan lainnya di Kota Manado.

Tabel 4.38 Hubungan kekuatan interaksi antar hirarki atau orde wilayah di Kota Manado dengan Analisis Gravitasi

	Hirarki I					Hirarki II					Hirarki III	Hirarki IV
	Wenang	Malalayang	Wanea	Mapanget	Tuminting	Sario	Paal Dua	Singkil	Bunaken	Tikala		
Hirarki I	Wenang	57182228.45	170823901.8	26509611.9	8837925.27	42944901.88	4368233.39	189312514.4	149123801.85	23202281.13	2284978.133	
	Malalayang	57182228.45	170823901.8	26509611.9	8837925.27	42944901.88	4368233.39	189312514.4	149123801.85	23202281.13	2284978.133	
	Wanea	170823901.8	1344147710.9	43915024.27	47769428.41	84571503.23	14034848.7	151007272.8	30243803.64	91147261.08	367802153.6	
	Mapanget	26509611.9	43915024.27	43948809.7	43229018.82	20007506.96	45641475.66	18487403.42	23423897.56	106399072.13	3023897.011	
	Tuminting	8837925.27	47769428.41	108837823.3	43229018.82	37088728.45	733623463.53	282391783.3	423616221.69	409111847.17	30517066.91	
	Sario	42944901.88	84571503.23	1324673152.2	20007506.96	17088728.45	16792237.5	58823833.33	110402522.5	25700665.71	14139727.37	
	Paal Dua	4368233.39	40461786.14	14644948.7	43943475.66	733623463.53	36792375	9235987.56	28791828.49	106490246.3	577382.48	
Hirarki II	Singkil	189312514.4	81280148.16	155007272.8	18487403.42	282391783.33	58823833.33	91201507.56	43438884.92	402108727.75	3807406.13	
	Bunaken	149123801.85	20200801.95	30243803.64	23423897.56	423616221.69	13040252.2	207915628.49	43438884.92	122033847.27	2254088.19	
Hirarki III	Tikala	23202281.13	447314438.49	91147261.08	106399072.13	409111847.17	23700665.71	14810827.75	122033847.27	1302487.46		
Hirarki IV	Bunaken Kepulauan	2284978.133	36420303.95	367802153.6	3023897.011	30575066.91	14139727.37	1778821.68	30474066.13	2254088.19	1302487.46	

Sumber : Hasil Analisis, Penulis 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat di simpulkan bahwa kekuatan interaksi yang terkuat atau tertinggi adalah hirarki I terhadap Hirarki II, kekuatan interaksi wilayah sedang adalah hirarki II ke hirarki III, serta interaksi wilayah yang lemah yaitu antara hirarki III dan Hirarki IV. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, interaksi wilayah yang terkuat terjadi antara wilayah Kecamatan Wenang terhadap Kecamatan Singkil, Wanea, dan Malalayang dengan nilai gravitasi berkisar diatas 800.000.000. Kekuatan interaksi wilayah sedang terjadi antara-wilayah Kecamatan Wenang terhadap Kecamatan Malalayang, Sario, Paal Dua, Dan Mapanget dengan nilai gravitasi berkisar, 250.000.000 – 500.000.000. Sedangkan kekuatan interaksi wilayah yang lemah adalah interkasi wilayah antara Kecamatan Wenang terhadap Kecamatan Tikala, Bunaken, dan Bunaken Kepulauan dengan nilai gravitasi berkisar, 200.000.000.



Gambar 4.77. Peta Kekuatan Interaksi Antar Kecamatan Di Kota Manado

Analisis Kesesuaian Pusat Pelayanan Dalam RTRW Kota Manado Tahun 2014 – 2034 Terhadap hasil Penelitian

Melalui rencana RTRW Kota Manado yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Manado, telah ditetapkan 3 kelompok pusat pelayanan Kota Manado yaitu : Pusat Pelayanan Kota (PPK) , Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan. Sedangkan dalam analisis skalogram terdapat 4 orde pembagian kelas.

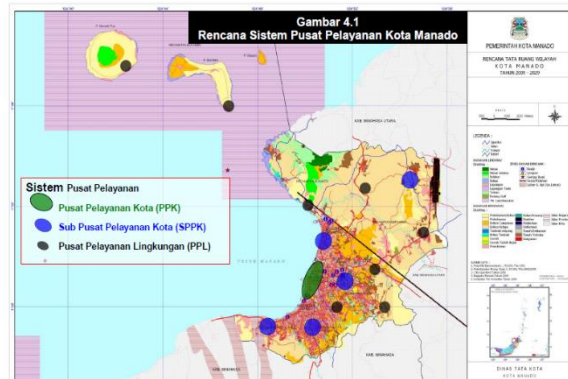
Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa terdapat lima kecamatan berada pada ordo/hierarki I (tertinggi) yaitu Kecamatan Malalayang, Kecamatan Wenang, Kecamatan Wanea, Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Mapanget. Dengan demikian, penetapan Kecamatan Wenang, Kecamatan Malalayang, dan Kecamatan Mapanget sebagai pusat pelayanan kota dalam draf revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado telah sesuai dengan kemampuannya karena berada pada hierarki I. Adapun perbandingan antara RTRW Kota Manado Tahun 2014 dan hasil analisis adalah sebagai berikut :

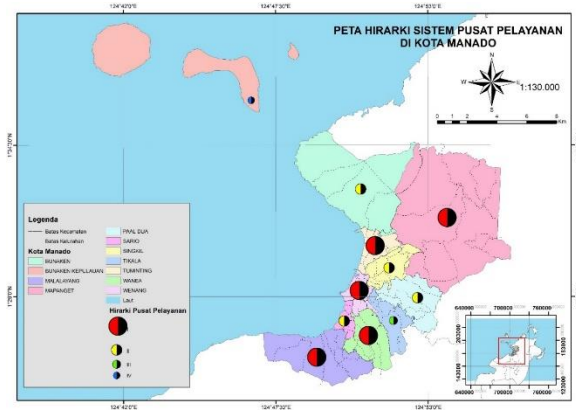
Tabel 4.41 Perbandingan Antara Pusat Pelayanan Dalam RTRW Kota Manado 2014-2034 Dengan Kondisi Eksisting Tahun 2019

Rencana Sistem Pusat Pelayanan dalam RTRW Kota Manado Tahun 2014-2034	Kecamatan	Orde/Hierarki Kota	Hierarki Pusat Pelayanan Berdasarkan Analisis Kemampuan Eksisting Tahun 2019	Kecamatan	Orde/Hierarki Kota
Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Kecamatan Wenang	I	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Kecamatan Wenang	I
	Kecamatan Sario			Kecamatan Malalayang	
	Kecamatan Malalayang			Kecamatan Wanea	
	Kecamatan Wanea			Kecamatan Mapanget	
Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	Kecamatan Padi Dua	II	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	Kecamatan Padi Dua	II
	Kecamatan Tuminting			Kecamatan Sario	
	Kecamatan Mapanget			Kecamatan Sario	
	Kecamatan Wanea			Kecamatan Sario	
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kecamatan Padi Dua	III dan IV	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kecamatan Sario	IV
	Kecamatan Padi Dua			Kecamatan Sario	
	Kecamatan Padi Dua			Kecamatan Sario	
	Kecamatan Padi Dua			Kecamatan Sario	

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2019

Dari hasil perbandingan tabel 4.31 dapat diketahui bahwa perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Manado pada tahun 2014 belum mengalami perubahan yang sesuai dengan harapan. Pada Kecamatan Wenang dan Sario diproyeksikan sebagai Pusat Pelayanan Kota menurut RTRW Kota Manado pada tahun 2014 tersebut mengalami ketidaksesuaian dengan hasil analisis khususnya Kecamatan Sario yang tidak sesuai dengan hasil analisis, diperoleh bahwa justru dari kedua proyeksi daerah kecamatan tersebut memiliki jumlah fasilitas yang tidak berada pada kelas yang paling atas untuk kecamatan sario. Sebaliknya kecamatan yang memiliki jenis pelayanan fasilitas yang ada adalah Kecamatan Wenang, Malalayang, Wanea, Mapanget, dan Tuminting. Kecamatan Wenang memang merupakan Kecamatan dengan pusat pelayanan kota sedangkan pada kecamatan Malalayang, Wanea, Mapanget, dan Tuminting yang berpredikat sebagai sub pusat pelayanan kota justru memiliki kelengkapan fasilitas yang lengkap. Secara geografis, pusat pelayanan atau pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (place of attraction) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota itu. Berikut adalah peta perbandingan antara Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Dalam RTRW Kota Manado Tahun 2014-2034 dengan Peta Hirarki Sistem Pusat Pelayanan Di Kota Manado Berdasarkan Hasil Analisis.





Gambar 4.78 Perbandingan Antara Pusat Pelayanan Dalam RTRW Kota Manado 2014-2034 Dengan Kondisi Eksisting Tahun 2019

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis ketersediaan fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan di Kota Manado yaitu :
Sebaran fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan di Kota Manado, penyebarannya telah cukup memadai terutama di kecamatan yang berstatus orde I seperti Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Wanea, Kecamatan Wenang, dan Kecamatan Tuminting. Semua kecamatan tersebut memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan memadai. Berdasarkan hasil analisis skelogram secara hierarkis di Kota Manado terdapat lima pusat pelayanan wilayah yang melayani dan menopang wilayah lainnya yaitu dengan Hirarki I yakni Kecamatan Wenang, Malalayang, Wanea, Mapanget, dan Tuminting. Kemudian berdasarkan Analisis Indeks Sentralitas Marshal, Kecamatan Wenang menempati orde/hirarki I dengan jumlah yang berarti memiliki seluruh fasilitas dengan nilai indeks sentralitas tertinggi yaitu Kecamatan Wenang. Berdasarkan analisis gravitasi ditemukan dua wilayah kecamatan yang memiliki nilai interaksi wilayah lemah terhadap Kecamatan Wenang yang berperan sebagai pusat pelayanan wilayah. Kelima

kecamatan tersebut adalah Kecamatan Paal Dua, Mapanget, Tikala, Bunaken, dan Bunaken Kepulauan. Pengembangan pusat pelayanan wilayah baru sangat disarankan untuk dikembangkan di wilayah kecamatan ini karena kelima kecamatan ini memiliki nilai interaksi yang lemah terhadap pusat pelayanan wilayah di Kota Manado yaitu Kecamatan Wenang.

2. Berdasarkan dari hasil analisis kesesuaian Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Manado Tahun 2014 dengan hasil analisis sistem pusat pelayanan dalam penelitian ini yaitu terdapat ketidaksesuaian pusat pelayanan terhadap kondisi eksisting tahun 2019. Yaitu Kecamatan Sario, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Wanea, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Bunaken, dan Kecamatan Tikala.

Saran

1. Ketidaksesuaian Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Manado Tahun 2014 dengan hasil analisis dalam penelitian ini maka diusulkan agar pengambil kebijakan dapat mengakomodir dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034.
2. Diperlukan komitmen pemerintah untuk menyediakan prasarana dan sarana sesuai dengan struktur dan hirarki wilayah agar dapat secara optimal melayani kebutuhan penduduk dan kegiatannya

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita,. 2006. Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Alkadri, 2001. Tiga Pilar dalam Pengembangan Wilayah: Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Teknologi. BPPT, Jakarta

- Amos rapoport. 1983. *The meaning of the built environment*. Beverly hills: sage publications.
- Andrey Roland Gunena, 2016. *Hirarki Wilayah Kota Manado*. Jurnal PWK Unsrat. Manado
- Budiharsono, Sugeng. 2005. Teknik Analisa Pembangunan dan Pesisir. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bruce Maldy Pratama, 2018. Analisis Hierarki Wilayah Dan Interaksi Wilayah Untuk Penentuan Pusat Pelayanan Wilayah Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2019. Kota Manado Dalam Angka.
- Daldjoeni, 2010. Geografi Baru Organisasi Keruangan Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: Alumni.
- Ermawati. 2010. Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Universitas Sebelas Maret. Surakarta:
- Ghafara, 2015. "Kajian Skolagram Guttman dan Indeks Sentralitas Marshall Untuk Penentuan Pusat-Pusat Pelayanan Wilayah. Studi Kasus: Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara". Makalah. Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STINAS).
- Hesty, 2010. Skripsi Analisis Pengembangan Kecamatan Kemiling Sebagai Pusat Perniagaan. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, Lampung
- Jayadinata, dan Paramandika. 2006. Pembangunan Desa dalam Perencanaan. Penerbit Institut Teknologi Bandung, Bandung
- Kasiram, 2008. Metodologi Penelitian. Penerbit : UIN-Maliki Press Malang
- Mahi, La. 2009, Analisis Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Pada Perwilayahan Pembangunan Di Kabupaten Muna. (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo; Kendari.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan). LP3ES, Jakarta.
- Nia Pontoh & Iwan Setiawan. 2008. Pengantar Perencanaan Kota. Bandung. Penerbit ITB
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado 2014-2034
- Riyadi. 2007. Pengembangan Wilayah Teori dan konsep Dasar, dalam Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Kajian Konsep dan Pengembangan. Penerbit Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta.
- Rondinelli, Dennis and Kenneth Ruddle. 1978. *Urbanization and Rural Development A Spatial Policy for Equitable Growth*. New York: Praeger Publisher.
- Schoenmaker (1984), Model Interaksi Dalam Perannya (Daljoeni, 1997: 204)
- Salim, E.1996. Pembangunan Ekonomi Dan Pemerataan. Idayu. Jakarta
- Sitohang, 2001. Dasar-dasar ilmu ekonomi Regional. Jakarta. FE UI.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta

Sukasmianto, 1999, Analisis Hirarki Wilayah dan Hubungannya Dengan Produktivitas Lahan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Bogor, Skripsi, Bogor, Fakultas Pertanian IPB.

Saefulhakim, 2002. Studi Penyusunan Wilayah Pengembangan Strategis (Strategic Development Regions). IPB dan Bapenas. Bogor.

Standar Nasional Indonesia nomor 2003-1733 Tahun 2004. Tata Cara Perencanaan lingkungan dan Perumahan di Perkotaan

Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaan pembangunan wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.

Tondobala Linda, Cynthia Wuisang, Leidy Rompas. 2017. Penentuan Hirarki Pengembangan Wilayah Pada Pulau-Pulau Kecil Berpotensi Wisata Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jurnal PWK Unsrat. Universitas Sam Ratulangi Manado. 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang